

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan suatu wilayah yang terletak di kawasan Samudera Pasifik dan menjadi jalur lalu lintas perdagangan negara-negara di dunia serta memiliki potensi sumber daya alam berupa perikanan, gas alam, dan minyak bumi. Menurut laporan U.S *Energy Information Administration* (EIA), potensi sumber daya alam tersebut diketahui mencapai 213 miliar barrel cadangan minyak dan 900 triliun kaki kubik cadangan gas alam.<sup>1</sup> Berdasarkan pada potensi yang ada pada wilayah LTS, memicu tindakan negara-negara yang berada di sekitar wilayah LTS untuk melakukan klaim terhadap wilayah tersebut. Terdapat enam negara yang melakukan klaim atas kepemilikan wilayah LTS, yaitu Tiongkok, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Taiwan. Dengan sebagian besar wilayah dikuasai oleh Tiongkok berdasarkan kebijakan *nine-dash line* yang dikeluarkan oleh pemerintahan Tiongkok pada tahun 1974. Akibatnya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) klaim di wilayah LTS dan hal ini menyebabkan kecenderungan munculnya konflik antar negara yang melakukan klaim di wilayah tersebut.

Dengan bergulirnya konflik di wilayah LTS, stabilitas keamanan pun menjadi ancaman tersendiri. Adapun Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang telah memproklamirkan diri sebagai polisi dunia dengan berlandaskan pada tujuan

---

<sup>1</sup> U.S. *Energy Information and Administration*. "South China Sea", (2008). Diakses melalui <https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=SCS> pada tanggal 1 Juli 2018

untuk menciptakan perdamaian dunia, menciptakan kemakmuran, dan kebebasan, mulai ikut andil dalam konflik yang terjadi di LTS.<sup>2</sup> Berdasarkan pada pola kebijakan AS selama ini, kehadiran AS di Asia juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk sikap AS dalam menghentikan munculnya dominasi dari negara lain setelah perang dunia kedua berakhir.<sup>3</sup> Hal ini juga ikut dipengaruhi oleh kemampuan dari masing-masing negara di dunia dalam menafsirkan strategi menjadi *great power* setelah terjadinya perang dingin, yakni meningkatkan kapabilitas negaranya dan mampu menghadapi *great power* lainnya dalam tataran sistem internasional.<sup>4</sup> Hal inilah yang memicu tindakan AS sebagai *great power* dalam menghadapi Tiongkok sebagai kekuatan baru di Asia yang mampu melakukan perubahan struktur pada sistem internasional terutama di kawasan Asia dan melalui wilayah strategis LTS.

Adapun keterlibatan AS di LTS mulai berlangsung secara intensif pada masa pemerintahan Barack Obama dengan diawali oleh isu peralihan atensi politik AS dari kawasan Timur Tengah menuju Asia Pasifik melalui kebijakan “Pivot to Asia”, dan diimplementasikan melalui strategi “Asia’s Rebalancing” dalam bentuk pengembangan aktifitas militer AS di Asia, penguatan hubungan mitra strategis dan sekutu AS yang berada di kawasan terkait dengan isu keamanan, perdagangan, serta mendorong peningkatan peran institusi kawasan Asia yang difokuskan pada kawasan Asia Tenggara.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Kim R Holmes, “Agenda Kebijakan Luar Negeri AS: Internasionalisme Amerika”. Diakses melalui <https://www.scribd.com/doc/186054280/Council-on-Foreign-Relations-Rosters-2007-2013> pada tanggal 1 juli 2018. Hal. 6

<sup>3</sup> Bailey, Jonathan. “Great Power Strategy in Asia: Empire, Culture, and Trade 1905-2005”. New York: Routledge. Hal 139-140

<sup>4</sup> Mearsheimer, Jhon. “The Tragedy of Great Power Politics”. (2001). New York: Norton. Hal. 751

<sup>5</sup> Tide Aji Pratama, “Posisi Indonesia dan Kebijakan *Rebalancing* AS di Asia Tenggara”, *Journal Politis, Politics & International Studies* Vo;.1 No. 1 (2017). Hal. 4

Strategi “Asia’s Rebalancing” yang telah ditetapkan AS pada masa pemerintahan Obama didukung oleh kebijakan-kebijakan AS terkait sengketa di wilayah LTS yang terdapat dalam situs resmi Departmen Luar Negeri AS pada tahun 1995 (pada masa pemerintahan sebelum Obama), yaitu menyelesaikan sengketa secara damai, menjaga perdamaian dunia, dan ikut menjaga stabilitas kawasan, serta menjaga kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*) di laut internasional, akan bersifat netralitas dalam menyelesaikan suatu sengketa, dan menghargai prinsip-prinsip internasional yang telah ditetapkan secara bersama oleh negara-negara di dunia dalam UNCLOS 1982.<sup>6</sup> Hal ini kembali dipertegas melalui pernyataan dari *United States Institute of Peace* pada tahun 1996, bahwa AS menginginkan wilayah LTS sebagai perairan internasional, sehingga menurut Hukum Internasional, latihan militer serta pengumpulan data intelijen diizinkan untuk dilakukan di wilayah tersebut. Ditambah dengan penjelasan mengenai kepentingan AS di LTS yang berkaitan dengan kebebasan bernavigasi untuk wilayah laut dan penerbangan untuk wilayah udara diatas LTS. Pernyataan ini pun menjadi bentuk penolakan AS terhadap klaim Tiongkok yang lebih lanjut akan berdampak pada penggunaan wilayah LTS harus membutuhkan izin dari Tiongkok terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Obama melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Hillary Clinton selaku menteri Luar Negeri AS dalam pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF)

---

<sup>6</sup>Fravel, M. T, “The US and China in Regional Security: Implications for Asia and Europe”, Makalah dalam The 6<sup>th</sup> Berlin Conference on Asian Security (2012). Hal. 11

<sup>7</sup> United States Institute of Peace, “The South China Sea Dispute: Prospect for Preventive Diplomacy”, Special Report, No. 18 (agustus, 1996)

di Hanoi. Hillary Clinton menyatakan bahwa kebijakan AS terhadap LTS akan melanjutkan kebijakan dari tahun 1995 dan pengimplementasian strategi *Asia's Rebalancing* dengan beberapa tambahan kebijakan baru, yaitu;<sup>8</sup> AS mendukung proses diplomatik yang kolaboratif antar negara-negara yang melakukan klaim terhadap wilayah LTS agar dapat mencapai perdamaian, dan klaim wilayah yang dilakukan negara-negara di LTS harus melalui pengukuran daratan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku (UNCLOS 1982), serta AS akan memfasilitasi *confidence building measures* sesuai dengan *Declaration of Conduct* tahun 2002 serta ikut mendukung penyusunan *draft* lengkap tata berperilaku (*Code of Conduct*) di LTS. Kebijakan ini berhubungan dengan AS yang sangat mendukung peran institusi kawasan yaitu ASEAN dalam berupaya menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota ASEAN yang melakukan klaim terhadap wilayah LTS bersama dengan Tiongkok menetapkan sebuah pengaturan berperilaku di wilayah sengketa tersebut.

Dalam penelusuran lebih lanjut, diklaimnya LTS oleh Tiongkok secara garis besar ikut menimbulkan kerugian pada negara-negara yang berada di sekitar wilayah LTS dan pun kerugian pada AS yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut berupa tempat lalu lintas barang dagang AS dengan negara-negara di Asia dan lainnya. Hal ini dibuktikan melalui kebijakan kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*) yang berusaha diberlakukan AS agar wilayah LTS tetap menjadi perairan internasional.<sup>9</sup> Seperti yang pernah dinyatakan oleh Hillary Clinton bahwa

---

<sup>8</sup> U.S Department of State (2010). "Remarks at Press Availability". Diakses melalui: <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/07/145095.html> pada tanggal 1 Juli 2018

<sup>9</sup> Sofia Trisni, Apriwan, & Poppy Irawan, "Strategi Indonesia dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY, (Studi Kasus: Laut Tiongkok Selatan)". *Andalas Journal of International Studies* Vol 5 No 2 (November, 2016). Hal. 138

AS memiliki kepentingan nasional dalam kebebasan bernavigasi, membuka akses ke wilayah maritim Asia, dan menghormati hukum internasional di LTS. Bahkan AS tidak hanya mengajak negara-negara anggota ASEAN namun juga negara maritim lainnya serta komunitas internasional yang jangkauannya lebih luas.<sup>10</sup> Dengan arti lain bahwa AS memiliki kebutuhan berupa lancarnya lalu lintas kapal AS melewati wilayah LTS dan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah LTS secara bebas sesuai dengan peraturan internasional terkait pemanfaatan dan kebebasan suatu negara di perairan internasional.

Amerika Serikat mulai mengidentifikasi adanya ancaman yang akan didapatkan AS apabila wilayah LTS diklaim sepenuhnya oleh Tiongkok. Menurut Departemen Pertahanan AS, Tiongkok berupaya untuk mempertahankan statusnya sebagai kekuatan besar dalam mendominasi kawasan melalui peningkatan kekuatan militernya sehingga dapat menentang kepentingan AS.<sup>11</sup> Hal ini didasari oleh beberapa tindakan Tiongkok yang dipandang sebagai suatu ancaman seperti pada tahun 2011 adanya kegiatan eksplorasi sumber daya berupa survey dan pengeboran minyak di blok 119 kawasan LTS oleh perusahaan ExxonMobil Amerika Serikat melalui perusahaan nasional Vietnam cenderung dihalangi oleh Tiongkok. Sedangkan eksplorasi hasil laut yang dilakukan AS hanya berupa pengeboran minyak melalui perusahaan Vietnam tersebut. Hal ini tentu ikut mempengaruhi aktifitas perekonomian AS yang cukup membutuhkan sumber daya alam berupa

---

<sup>10</sup> Muhammad Rafi Darajat, dkk, "Implikasi Hukum atas Putusan Permanent Court of Arbitration terkait Sengketa Laut China Selatan terhadap Negara di sekitar Kawasan tersebut", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2 No.1, (September 2017). Hal. 2

<sup>11</sup> Bendini, Roberto. "United States-China Relations: A Complex Balance Between Cooperation & Confrontation. 2016. Directorate General for External Policies Policy Department European Union. Hal. 19-20

minyak yang berasal dari berbagai penjuru dunia dan melalui wilayah LTS salah satunya. Sebelumnya pun pada tahun 2008, Tiongkok telah melakukan penghadangan terhadap kapal USNS Impeccable (kapal pengintai AS yang dirancang untuk mendeteksi ancaman dari bawah laut) dan kapal angkatan laut AS sebagai kapal pengawas stabilitas keamanan yang melewati wilayah LTS dengan tujuan penegakan kebebasan bernavigasi di perairan internasional.<sup>12</sup>

Tidak hanya itu, melihat dari kepentingan ekonomi AS di wilayah LTS, AS mengidentifikasi ancaman akan penggunaan wilayah LTS sebagai jalur perdagangan bebas AS dengan negara Asia seperti India dan negara-negara bagian Asia Tenggara. Terhitung seluruh barang dagang AS yang melewati wilayah tersebut bernilai lebih dari \$1,2 triliun setiap tahunnya.<sup>13</sup> Selain itu, wilayah LTS sebagaimana statusnya sebagai perairan internasional pun digunakan AS untuk melakukan latihan maritim secara berkala, seperti latihan maritim yang dilakukan AS pada tahun 2014 sebagai bentuk latihan rutin tahunan dengan mengikutsertakan Filipina guna melayani pertolongan darurat yang terjadi di wilayah perairan. Adapun latihan yang dilakukan berupa latihan razia kapal laut, pendaratan di pantai, latihan peluru tajam dan gerakan penggunaan lapis baja. Latihan maritim pun digelar di sekitar wilayah kepulauan Sparty.<sup>14</sup> Sementara itu, Apabila Tiongkok melakukan klaim atas wilayah tersebut, maka LTS tidak lagi menjadi perairan internasional dan AS harus menghadapi Tiongkok ketika harus menggunakan jalur

---

<sup>12</sup> Melita Angelin Bidara, Michael Mametu, & Trilke Tulung, “Kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik Laut Cina Selatan”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 (2018). Hal 7

<sup>13</sup> Ring, Andrew H, “A US South China Sea Perspective: Just Over the Horizon”, Harvard University: Weatherhead Center for International Affairs. Hal. 132

<sup>14</sup> Filipina, AS Adakan Latihan Militer di Laut China Selatan, diakses melalui [www.voaindonesia.com/amp/2465813html](http://www.voaindonesia.com/amp/2465813html) pada tanggal 1 Juli 2018

wilayah LTS. Berdasarkan ancaman yang akan didapatkan AS atas klaim Tiongkok di wilayah tersebut, AS kemudian melakukan serangkaian tindakan sebagai bentuk strategi dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya di wilayah LTS.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adanya klaim Tiongkok dan beberapa negara lain terhadap wilayah LTS menimbulkan konflik berkepanjangan yang mengakibatkan terganggunya kestabilan politik dan keamanan di wilayah LTS. Hal ini mempengaruhi aktifitas negara-negara yang berada di wilayah tersebut, termasuk AS. Keberadaan AS di wilayah LTS mengindikasikan kepentingan AS di wilayah tersebut. Melalui kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintahan AS, menggambarkan bagaimana AS menginginkan wilayah LTS tetap sebagai wilayah perairan internasional dengan tujuan adanya kebebasan bernavigasi dan kebebasan penggunaan jalur udara diatas wilayah tersebut. Tidak hanya itu, kebebasan dalam melakukan eksplorasi sumber daya yang terdapat di LTS juga menjadi salah satu kepentingan AS. Dengan adanya klaim dari Tiongkok pada sebagian besar wilayah LTS, menimbulkan ancaman tersendiri bagi AS seperti halnya tindakan Tiongkok yang melakukan penghadangan pada kapal pengawasan AS di wilayah tersebut, sehingga menarik untuk meneliti strategi yang dilakukan AS dalam menghadapi Tiongkok guna mencapai kepentingannya di wilayah LTS.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah “bagaimana strategi Amerika Serikat dalam menghadapi Tiongkok guna mencapai kepentingan nasionalnya di Laut Tiongkok Selatan?”

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Amerika Serikat dalam menghadapi Tiongkok guna mampu mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Adapun kepentingan AS di LTS yaitu penegakkan kebebasan bernavigasi dengan tujuan adanya kebebasan lalu lintas kapal AS melewati LTS dan ikut menjaga stabilitas keamanan wilayah LTS.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan diantaranya:

1. Dalam keilmuan Hubungan Internasional, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami bagaimana suatu negara dapat bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya.
2. Dalam lingkungan umum, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana upaya negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya di sistem internasional.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan landasan penelitian dengan berisikan tulisan-tulisan yang pernah dibuat sebelumnya dan memiliki kesamaan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan secara ringkas mengenai beberapa bahan bacaan berupa literatur ilmiah seperti buku dan artikel jurnal terkait dengan topik penelitian yaitu strategi AS menghadapi Tiongkok dalam mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah LTS pada masa Obama.

Tinjauan pustaka yang pertama diambil dari tulisan Robert D. Kaplan yang berjudul *Asia's Cauldron the South China Sea and The End of a Stable Pacific*.<sup>15</sup> Tulisan ini membahas mengenai negara-negara yang berada di sekitar wilayah LTS dan kemuculan konflik di wilayah tersebut serta implikasinya dalam perdamaian dan stabilitas dunia. Pada tulisan ini Kaplan menggambarkan kepentingan AS di Asia terkait dengan adanya peningkatan peran dan dominasi Tiongkok di kawasan tersebut. Kepentingan yang dimaksud kemudian didefinisikan oleh Kaplan berdasarkan pada tujuan dan motivasi suatu negara dalam menghadapi sebuah konflik. Adapun tujuan dan motivasi tersebut dilandaskan pada wilayah geografis dan dijelaskan melalui perjalanan Kaplan dalam memahami negara-negara di dunia terutama wilayah Asia.

Perjalanan di mulai dengan memahami geografis negara-negara asia yang kemudian memasuki konflik wilayah Laut Tiongkok Selatan. Konflik terjadi akibat adanya tumpang tindih klaim dari negara-negara yang berada di sekitar wilayah tersebut, yaitu Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei

---

<sup>15</sup> Robert D. Kaplan. "Asia's Cauldron the South China Sea and The End of a Stable Pacific". (2015)

Darussalam. Yang menarik dari konflik ini ialah adanya keterlibatan negara selain dari negara yang telah melakukan klaim, yaitu Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan dominasi Tiongkok di wilayah LTS telah menghambat aktifitas AS yang melewati wilayah tersebut. Pada dasarnya, pertemuan antar kepentingan Tiongkok dan AS di wilayah LTS dapat dirujuk melalui perjalanan sejarah hubungan kedua negara pasca perang dingin. Sejarah panjang hubungan antar kedua negara dan dengan adanya indikasi potensi yang dimiliki oleh LTS, memaksa kedua negara untuk saling mempertahankan keberadaannya di wilayah tersebut dengan berbagai cara seperti halnya meningkatkan kapasitas militernya di wilayah LTS.

Adapun tulisan Kaplan tersebut dapat membantu peneliti dalam menggambarkan konflik yang terjadi di wilayah LTS dan dominasi Tiongkok di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, tulisan ini pun menyinggung terkait dengan upaya yang dilakukan AS dalam menghadapi dominasi Tiongkok di wilayah LTS, namun hanya dalam bentuk peningkatan kapabilitas militer dan memiliki tujuan untuk mempertahankan kepentingannya berupa pemanfaatan potensi yang terdapat di wilayah tersebut. Adapun perbedaan tulisan ini dengan penelitian ialah peneliti berupaya untuk mengidentifikasi kepentingan AS baik dalam bentuk kepentingan ekonomi maupun pertahanan dan menganalisis strategi yang dilakukan AS pada masa Obama tanpa penarikan sejarah panjang hubungan kedua negara pasca perang dingin dengan tujuan mendapatkan hasil upaya AS dalam menghadapi Tiongkok di wilayah LTS.

Tulisan kedua diambil dari tulisan Melita Angelin Bidara, Michael Mamentu, dan Trilke Tulung yang berjudul “Kepentingan Amerika Serikat dalam

Konflik Laut Cina Selatan”.<sup>16</sup> Tulisan ini membahas mengenai kepentingan nasional AS dalam konflik LTS yang diuraikan melalui konsep kepentingan nasional dengan menggunakan pemikiran dari Donald E. Nuechterlin. Tulisan ini pun membantu peneliti dalam mendefinisikan kepentingan-kepentingan AS dalam konflik yang terjadi di wilayah LTS seperti adanya indikasi kepentingan AS dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan perimbangan kekuatan dalam tata internasional.

Adapun dalam bidang ekonomi, AS memiliki kepentingan atas jalur perdagangan yang melewati kawasan LTS. Sedangkan dalam bidang pertahanan, AS menginginkan adanya stabilitas dan perdamaian regional serta mempertahankan akses tanpa hambatan di perairan tersebut. Selain itu, AS juga ikut mempertahankan kekuatan hegemonnya sehingga tetap menjadi negara yang dominan di kawasan Asia Pasifik. Adapun perbedaan tulisan ini dengan penelitian, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan AS yang terdapat di wilayah LTS baik kepentingan ekonomi maupun pertahanan keamanan AS berdasarkan pada konsep kepentingan Morgenthau dan bagaimana strategi-strategi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan AS dalam menghadapi Tiongkok guna mencapai kepentingan nasionalnya tersebut berdasarkan pada konsep logika strategi yang ditulis oleh Thomas J. Wright.

Tulisan ketiga diambil dari tulisan Arief Bakhtiar Darmawan dan Gebyar Lintang Ndadari yang berjudul “Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut

---

<sup>16</sup> Melita Angelin Bidara, Michael Mamentu, dan Trilke Tulung, “Kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik Laut Cina Selatan”, Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 (2018). Hal. 2-11

Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama”.<sup>17</sup> Tulisan ini membahas mengenai keterlibatan AS di wilayah LTS memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Dalam uraiannya, tulisan ini menjelaskan keterlibatan AS melalui konsep perimbangan kekuatan dan konsep keamanan nasional. Perimbangan kekuatan yang dilakukan AS di wilayah LTS mengingat adanya klaim sebagian besar wilayah LTS oleh Tiongkok yang memperlihatkan upaya Tiongkok dalam mendominasi kawasan tersebut. Pada tulisan ini, perimbangan kekuatan AS dijelaskan melalui kerjasama yang dilakukan AS dengan negara Filipina dan Vietnam. Selain itu, faktor keamanan nasional ikut menjadi acuan bagi AS dalam melibatkan diri pada sengketa LTS. Adapun tulisan ini memiliki kontribusi berupa penjabaran dari keterlibatan AS di wilayah sengketa LTS, namun tulisan ini belum mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membahas mengenai strategi dan tindakan AS dalam menghadapi Tiongkok guna mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah tersebut.

Tulisan keempat diambil dari tulisan Lowel Ditmer yang berjudul *China's Asia: Triangular Dynamics Since the Cold War*.<sup>18</sup> Tulisan ini membahas mengenai dinamika hubungan segitiga antara Tiongkok, AS, dan ASEAN pasca perang dingin. Adapun hubungan ketiga aktor tersebut memengaruhi tindakan masing-masing aktor dalam menghadapi konflik yang terjadi di kawasan Asia. Terkait dengan wilayah LTS, Ditmer menjelaskan adanya keterlibatan dari masing-masing aktor dalam penyelesaian konflik tersebut namun pada dasarnya kekuatan dari

---

<sup>17</sup> Arief Bakhtiar Darmawan, Gebyar Lintang Ndadari, “Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama”, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6. No. 1 (April-September,2017). Hal. 1-14

<sup>18</sup> Lowel Ditmer. “China's Asia: Triangular Dynamics Since the Cold War”. The Rowman & Littlefield Publishing Group (2018). Hal.1-302

Triangulasi tersebut baru dapat tercipta pada awal tahun 2017. Sementara itu, penelitian ini memiliki batasan waktu pada masa Obama yang tercatat pada tahun 2008 hingga 2016 namun belum mencapai keberhasilan Triangulasi hubungan AS, ASEAN, dan Tiongkok tersebut. Meskipun demikian, tulisan ini banyak membantu penelitian dalam menggambarkan hubungan antara AS dengan wilayah kawasan Asia baik ASEAN sebagai institusi regional Asia Tenggara dan Tiongkok sebagai negara yang dominan di wilayah Asia.

Tulisan kelima diambil dari tulisan David Sambaugh yang berjudul *China Goes Global*.<sup>19</sup> Tulisan ini membahas mengenai peningkatan kekuatan ekonomi dan politik Tiongkok yang kemudian memiliki pengaruh terhadap perkembangan global. Peningkatan kekuatan Tiongkok pun menciptakan adanya kekuatan hegemon baru di kawasan Asia. Tulisan ini mampu membantu peneliti dalam menggambarkan dominasi Tiongkok di kawasan Asia terutama di wilayah LTS yang kemudian menimbulkan ancaman bagi negara-negara yang melakukan aktifitas di wilayah tersebut. Tidak terkecuali AS sebagai negara yang memiliki kepentingan di wilayah LTS, merasa peningkatan kekuatan Tiongkok di wilayah Asia menimbulkan ancaman tersendiri dan mampu menghambat segala aktifitas jalur lalu lintas di wilayah tersebut.

Dengan bahan bacaan diatas, peneliti mampu menggambarkan bagaimana dinamika wilayah LTS hingga sengketa yang terjadi di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, tulisan-tulisan diatas juga menjelaskan bagaimana klaim Tiongkok hingga keterlibatan dan kepentingan AS di wilayah LTS, namun belum mampu menjawab pertanyaan dari penelitian ini, yaitu strategi yang dilakukan AS dalam

---

<sup>19</sup> David Sambaugh, "China Goes Global". OUP USA (2013). Hal. 1-409

mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya di wilayah sengketa tersebut. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana strategi AS dalam mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah LTS.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan sebuah landasan atas arah pola tingkah laku suatu negara. Dengan upaya melindungi identitas politik dan perekonomian suatu negara, kepentingan nasional cenderung membentuk kebijakan yang bersifat baik kooperatif maupun non-kooperatif.<sup>20</sup> Menurut Morgenthau, kepentingan nasional merupakan suatu keharusan bagi setiap negara dalam mempertahankan identitas fisik berupa wilayah teritorial dan identitas politik berupa dasar perpolitikan negara dan sistem perekonomiannya serta identitas sosial budaya yang berupa kebudayaan, religi, dan identitas lainnya. Pada dasarnya, kepentingan nasional terbagi atas:<sup>21</sup>

#### a. Ideologi

Ideologi sering menjadi landasan suatu tindakan pemerintahan dalam suatu negara dan cenderung mempengaruhi kebijakan yang hendak dibuat. Dengan mempertahankan ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut, maka negara mampu mempertahankan

---

<sup>20</sup> Theodore A. Coulumbis & James. H. Wolfe. "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis". Bandung: Bina Cipta, (1987). Hal. 168

<sup>21</sup> G.R. Berridge. "Diplomacy: Theory and Practice, 2<sup>nd</sup> Edition". New York: Palgrave. (2002). Hal. 148-189

identitasnya baik berupa identitas politik maupun mempertahankan dasar negaranya.

b. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor keberlangsungan hidup suatu negara, sehingga kepentingan nasional selalu mengacu pada arah perekonomian dan memiliki tujuan untuk mempertahankan kehidupan suatu negara. Perkembangan sebuah bangsa juga ikut dipengaruhi oleh kekuatan perekonomian negara, sehingga kebijakan dan tindakan negara akan cenderung pada peningkatan di bidang sektor ekonomi.

c. Keamanan

Keamanan merupakan unsur terpenting dari suatu negara dalam mempertahankan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kestabilan keamanan akan memberi dampak yang baik bagi negara yang bersangkutan, begitupun sebaliknya. Adapun pengaruh dari stabilitas keamanan dapat dilihat dari pencapaian suatu negara dalam mewujudkan kebijakan yang telah dibuat dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dalam mempertahankan tujuan negaranya untuk tetap menjadi negara yang berdaulat dalam sistem internasional baik secara territorial maupun secara ekonomi dan politik.

### ***1.7.2 Adverse Threat Transition Strategy***

Perubahan dalam struktur sistem internasional pada umumnya mempengaruhi transisi hegemoni negara-negara di dunia dan mendukung terjadinya perimbangan kekuatan antar negara *great powers*. Menurut Gilpin,

perubahan pada struktur sistem internasional diasumsikan menjadi beberapa tahap, yaitu; pertama, negara *great power* dalam sistem internasional cenderung mempertahankan status quo sehingga sistem internasional dalam keadaan yang seimbang dan stabil karena negara-negara tersebut menciptakan perimbangan kekuatan. Kedua, *great power* tidak dapat mencegah pertumbuhan dari negara lain sehingga kekuatan negara-neagra didalam sistem tidak lagi seimbang. Ketiga, negara-negara yang baru tumbuh tersebut cenderung untuk mengubah keseimbangan kekuatan dalam sistem dan apabila *great power* tidak mampu mengatasi hal tersebut, maka krisis akan terjadi. Terakhir, krisis yang tidak dikelola dengan baik akan menciptakan perang hegemoni hingga dapat mengembalikan keseimbangan kekuatan atau pun menciptakan perimbangan kekuatan yang baru.<sup>22</sup>

Adapun transisi hegemoni tidak akan terlepas dari ancaman yang dihasilkannya kepada seluruh negara yang ada didalam sistem internasional. Menurut Terry Terrif, ancaman dalam kajian keamanan nontradisional terbagi atas empat karakteristik, yaitu; pertama sebagian besar konflik tidak bersifat *state-centred* tetapi lebih kepada faktor non negara. Kedua, ancaman keamanan tidak memiliki suatu wilayah geografis tertentu. Ketiga, ancaman keamanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan tradisional suatu negara. Terakhir, ancaman keamanan dapat menyerang individu dan negara.<sup>23</sup> Untuk sasaran ancaman keamanan, ancaman terhadap individu cenderung berbentuk ancaman fisik, kekayaan individu dan pendapatan, serta nilai-nilai personal dan kepercayaan.

---

<sup>22</sup> Broto Wardoyo, "Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia", Nugra Media: Klaten (2015). Hal. 22

<sup>23</sup> Terry Terriff, Stuar Croft, Lucy James, and Patrick M. Morgan, "Security Studies Today", Malden: Polity Press (1999). Hal. 115-116

Sedangkan untuk ancaman terhadap kelompok individu atau pun negara dapat berupa ancaman militer, ancaman ekonomi, dan ancaman budaya.<sup>24</sup>

Dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari perubahan struktur dan kekuatan dalam sistem tersebut, Thomas J. Wright dalam disertasinya menjelaskan bagaimana sebuah negara *great power* menghadapi ancaman-ancaman yang timbul akibat dari perubahan kekuatan dalam sistem internasional melalui empat logika strategi yang akan berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai oleh negara *great power*, alat yang akan digunakan dalam proses mencapai kepentingan, dan konsekuensi yang akan didapatkan dari proses pencapaian yang dilakukan. Adapun empat logika strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1. *Superiority*

*Superiority* merupakan suatu strategi yang digunakan oleh negara *great power* dalam menghadapi ancaman yang timbul akibat perubahan struktur kekuatan dalam sistem internasional dengan cara memaksimalkan kemampuan material negaranya. Pada dasarnya, negara *great power* akan berupaya untuk meningkatkan kapabilitas negaranya dari negara yang menjadi sumber ancaman. Peningkatan kapabilitas tersebut akan mendorong negara *great power* dalam menggunakan kekuatan negaranya kapanpun saat dirasa perlu dengan indikasi dapat melakukan kerjasama dengan negara aliansinya karena pada prinsipnya *superiority* menginginkan terbentuknya dominasi oleh negara *great*

---

<sup>24</sup> David L. Rousseau & Rocio Garcia Rotamero, "Identity, Power, and Threat Perception a Cross-National Experimental Study", *Journal of Conflict Resolution*, Volume 51, Number 5 (October, 2007). Hal. 744-771

<sup>25</sup> Thomas J. Wright, "Great Power Responses to Threat Transition and the Legitimacy Burden US-Soviet Relations 1943-1950", Vol.1 Washington DC (2007). Hal 25-46

*power* sehingga lebih unggul dari negara yang telah menjadi sumber ancaman.

Logika strategi *superiority* sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh negara *Great Power* yaitu Amerika Serikat pada pasca perang dunia kedua. Peningkatan kapabilitas negara terus dilakukan AS guna menghadapi Uni Soviet pada masa perang dingin. Adapun pola tindakan AS yang terus meningkatkan materil negaranya baik secara militer maupun non-militer mengidentifikasi adanya keinginan AS untuk mendominasi sistem internasional dengan menyaingi negara-negara yang dirasa mengancam.

## 2. *Balance of Power Equilibrium* (BPE)

*Balance of Power Equilibrium* (BPE) merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh negara *great power* untuk menciptakan keseimbangan politik dan stabilitas sistem negara dengan saling berkompetisi untuk saling mengungguli. Pada dasarnya, BPE diciptakan oleh negara *great powers* melalui pelaksanaan kerjasama dengan negara yang juga mendapatkan ancaman yang sama dan hal ini memungkinkan untuk terjadinya kerjasama eksploitasi oleh *great power* terhadap negara lain.

Logika strategi BPE sendiri dapat digambarkan melalui tindakan atau pola tingkah laku yang terjadi di negara-negara Eropa pada masa berakhirnya perang Napoleon dan perang dunia pertama. Negara-negara tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Strategi ini menguraikan apabila negara-negara *great power* akan melakukan eksploitasi terhadap negara-negara yang memiliki kekuatan dibawahnya

guna menghadapi ancaman yang sama yaitu ancaman dari negara *great power* lainnya.

### 3. *Concerts*

*Concert* merupakan strategi negara *great powers* dalam mengatasi berbagai permasalahan dan politik internasionalnya dengan cara bekerjasama dengan negara lain yang juga memiliki permasalahan yang sama. Apabila kerjasama tersebut berhasil maka negara-negara tersebut akan mengesampingkan perbedaan yang dimiliki dalam mencapai kepentingannya secara bersama. Kerjasama akan cenderung bersifat jangka panjang dan tidak memungkinkan untuk terjadinya eksploitasi dalam kerjasama dikarenakan adanya pemikiran yang sama antar negara serta terbentuknya kelompok kerjasama guna mencapai kepentingan tertentu.

Strategi *concert* pun pernah digunakan negara *great power* seperti AS dan Uni Soviet dalam menghadapi perang dingin. Masing-masing negara berupaya untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan negaranya, sehingga *great power* mampu mempertahankan kekuatan dan kepentingan nasionalnya dalam tataran sistem internasional. Hal ini erat kaitannya dengan keberlangsungan hubungan antar negara di masa yang akan datang, seperti terbentuknya perjanjian-perjanjian antar negara guna mencapai suatu tujuan tertentu.

### 4. *Constitutional Transformation*

*Constitutional Transformation* merupakan strategi negara dalam menciptakan keteraturan politik dalam bentuk institusi legal dan konstitusi yang berlandaskan kepada nilai-nilai kebersamaan sehingga dapat melindungi semua negara tidak hanya *great power*. Pada prinsipnya, transformasi konstitusional ini berpendapat bahwa pengamanan kepentingan pun menjadi tolak ukur dalam mempertahankan keberadaan negara-negara di dunia. Logika strategi ini dahulunya digambarkan melalui kehadiran NATO sebagai institusi internasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Eropa pada pasca perang dunia kedua. Kemunculan institusi diharapkan mampu menciptakan keteraturan politik dan stabilitas hegemon negara-negara di dunia. Adapun tujuan dari pembentukan institusi juga berkaitan dengan pencapaian kepentingan bersama negara-negara di dunia tanpa adanya dominasi dari *great power*.

**Tabel 1.7.2.1 Ideal typical strategic logics**

<i>Strategic Logic</i>	<b>Strategic Goal</b>	<b>Alliances and Enmity</b>	<b>Use of force</b>	<b>Degree of cooperation</b>
<b>Superiority</b>	To maximize relative power over rivals	Asymmetrical, flexible	Whenever convenient	No; Power over rivals
<b>BPE</b>	Political equilibrium	Flexible: the enemy of my enemy is my friend	Limited uses of force frequently employed to maintain the political equilibrium	Minimum cooperation when necessary
<b>Concert</b>	Cooperation in pursuit of a common goal or goals (anti-revolution, prevention of the rearming of axis powers, etc.)	A fixed group of like-minded countries	Together in pursuit of common goals	Considerable cooperation
<b>Constitutional Transformation</b>	Creation of a constitutional order to protect all states, not just great powers	Fixed, common values	With institutional approval	Deep and institutionalized cooperation

Sumber: Thomas J. Wright, hal.47

Pada penelitian ini, AS sebagai *great power* melakukan beberapa tindakan untuk menghadapi ancaman yang dihasilkan dari perubahan sistem yang terjadi pada dinamika LTS. Adapun tindakan AS mengacu pada peningkatan kekuatan di wilayah LTS dengan berupaya menyaingi kekuatan Tiongkok di wilayah tersebut, dengan kata lain bahwa AS memiliki tindakan yang cenderung menggunakan logika strategi *superiority*.

Tidak hanya itu, AS pun melakukan kerjasama dengan negara yang menghadapi ancaman serupa yaitu ancaman dari klaim Tiongkok pada sebagian besar wilayah LTS seperti Filipina dan Vietnam. Sementara itu, AS memiliki kecenderungan untuk melakukan kerjasama yang bersifat eksploitatif yang digambarkan melalui tindakan AS dalam menjalin kerjasama dengan negara yang

bukan *great power*, sehingga AS cenderung untuk tidak menjalin kerjasama dalam jangka panjang (*Concert*) dan pun AS berupaya untuk mewujudkan pembentukan institusi atau pun konstitusi yang mengatur seluruh aktifitas kerjasama dan tindakan negara-negara didalam sistem internasional seperti mendukung ASEAN sebagai institusi regional dalam menyelesaikan sengketa LTS dan mendorong terbentuknya dokumen perjanjian antar negara yang terlibat sengketa di wilayah tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana AS menggunakan strategi *Balance of Power Equilibrium* (BPE) dan *constitutional transformation* dalam mencapai kepentingan nasionalnya di LTS.

## 1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam ilmu hubungan internasional merupakan suatu proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti sebagai bentuk upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena tertentu dalam hubungan internasional.<sup>26</sup>

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap satu variabel melalui pendekatan studi kasus dengan cara menjelaskan suatu peristiwa, aktifitas, ataupun proses baik dari kelompok tertentu maupun individu secara mendalam. Adapun kasus-kasus tersebut akan dibatasi oleh waktu dan aktifitas tertentu serta dengan teknik

---

<sup>26</sup>Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia (1994). Hal. 2-3

pengumpulan data berdasarkan atas waktu dan aktifitas yang telah ditentukan tersebut.<sup>27</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif tersebut bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan nasionalnya di Laut Tiongkok Selatan. Strategi tersebut kemudian diuraikan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh AS di wilayah sengketa LTS.

### 1.8.2 Batasan penelitian

Dalam tujuan penelitian yang fokus pada kajian tertentu, peneliti menentukan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus pada strategi Amerika Serikat dalam menghadapi Tiongkok guna mencapai kepentingan nasionalnya di Laut Tiongkok Selatan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama yaitu dari tahun 2008 hingga 2016. Adapun tujuan peneliti dalam membuat penelitian pada jangkauan waktu tersebut ialah pada masa Obama, AS mulai mengalihkan atensi politik dan arah kebijakannya dari Timur Tengah ke Asia Pasifik melalui strategi *Asia's Rebalancing* AS. Tidak hanya itu, pada masa pemerintahan Obama, AS pun mulai melihat adanya transisi ancaman dari peningkatan kapabilitas Tiongkok di LTS sehingga AS mulai melibatkan diri secara intensif dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.

### 1.8.3 Unit dan Level Analisis

---

<sup>27</sup> Robert K. Yin. "Studi Kasus: Desain & Metode". Jakarta: Raja Grafindo Persada (2004). Hal. 25

Unit analisis atau variabel dependen merupakan suatu unit yang hendak dideskripsikan perilakunya, kemudian dijelaskan dan diprediksikan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, yang akan menjadi unit analisisnya adalah strategi Amerika Serikat. Sedangkan unit yang dampaknya terhadap unit analisis dan yang akan dijelaskan adalah unit eksplanasi atau yang disebut juga dengan variabel independen.<sup>29</sup> Yang akan menjadi unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah Klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan. Tingkat analisis merupakan suatu tingkatan atas objek yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian.<sup>30</sup> Tingkat analisis pada penelitian ini berada pada tingkat sistem. Penulis ingin melihat strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai suatu negara yang bukan merupakan wilayah yang berada dekat dengan Laut Tiongkok Selatan namun memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan sehingga mengikutsertakan negara-negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, dan Australia, serta Korea Selatan dalam pencapaian kepentingan tersebut.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik ini merupakan suatu metode pengumpulan data-data sekunder, yang mana data tersebut didapatkan dari sumber yang berbentuk literatur akademik berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita, dan *website* resmi. Studi kepustakaan bertujuan untuk

---

<sup>28</sup> Mochtar Mas' oed. Hal. 39

<sup>29</sup> Mochtar Mas' oed. Hal. 33

<sup>30</sup> Mochtar Mas' oed. Hal. 36

memperoleh data dan menemukan realitas yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan dalam suatu penelitian.<sup>31</sup>

Menurut Creswell, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melakukan observasi, melakukan *interview*, melakukan pengumpulan dokumen, dan melakukan pengumpulan bahan berupa audio visual. Observasi dan *interview* cenderung digunakan dalam penelitian yang membutuhkan data primer dengan cara turun ke lapangan dan melakukan pendekatan dengan objek serta subjek dalam penelitian. Sementara pengumpulan data berupa dokumen dan bahan audio-visual lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang dapat dilakukan melalui tulisan-tulisan peneliti terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, berita-berita yang ada di koran dan dokumen lainnya.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan dokumen sebagai data-data yang akan membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Adapun dokumen-dokumen tersebut berupa jurnal-jurnal, berita-berita, dan tulisan-tulisan penelitian terdahulu terkait wilayah LTS seperti sengketa yang terjadi, klaim masing-masing negara, keterlibatan dan kepentingan AS di wilayah tersebut, dan tindakan yang dilakukan AS di wilayah LTS.

---

<sup>31</sup> M. Nazir, "Metode Penelitian", Jakarta: Ghalia Indonesia (2003). Hal. 27

<sup>32</sup> John W. Creswell, "Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", Sage Publication (2014). Hal. 238-242

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara dalam menemukan dan memberikan makna pada serangkaian data dalam melakukan suatu penelitian.<sup>33</sup>

Menurut Miles dan Huberman, tahapan dalam analisis terbagi atas beberapa tahapan, yaitu:<sup>34</sup>

1. Pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti akan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu strategi AS dalam menghadapi Tiongkok guna mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah LTS pada masa Barack Obama. Data yang dikumpulkan berupa literatur akademik seperti buku Kaplan terkait dengan konflik LTS dan dominasi Tiongkok di wilayah tersebut, kemudian jurnal-jurnal terkait tindakan dan kepentingan AS di wilayah LTS, serta situs resmi seperti situs pertahanan dan department luar negeri AS terkait dengan keterlibatan dan kebijakan AS di LTS.
2. Pengelompokan data, pada tahapan ini peneliti melakukan pengkodean terhadap data. Pengkodean dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat menjadi beberapa kategori. Pengelompokan yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pada kategori keterlibatan dan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Laut Tiongkok Selatan, klaim Tiongkok di LTS, dan strategi

---

<sup>33</sup> John W. Creswell. Hal. 9

<sup>34</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "Qualitative Data Analysis", London: Sage Publication (1994). Hal.18.

AS dalam mencapai kepentingannya di LTS. Setelah pengelompokan data dilakukan, maka peneliti akan memusatkan data pada dokumen-dokumen yang sangat berkaitan dengan pembahasan strategi AS dalam mencapai kepentingannya di wilayah LTS

3. Reduksi data (*data reduction*), pada tahapan ini peneliti melakukan pemangkasan pada data-data yang kurang dibutuhkan dalam penelitian sehingga data yang digunakan hanyalah data-data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian.
4. Penyajian data (*data display*), setelah membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bahasan yang sedang diteliti, peneliti akan mengambil poin-poin penting dari bacaan tersebut dan menuliskannya kembali menggunakan kalimat peneliti tanpa mengubah arti dan ide dari peneliti sebelumnya. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap bahan bacaan yang telah dikumpulkan. Untuk memulai penelitian, peneliti akan memulai analisis dari definisi kepentingan AS di wilayah LTS hingga ancaman yang diterima AS dari klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah LTS. Dari definisi tersebut, peneliti akan menganalisis strategi yang dilakukan AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya di LTS sesuai dengan logika strategi yang ditulis oleh Thomas J. Wright dalam disertasinya mengenai konsep *adverse threat transition strategy*.

5. Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion and verification*), setelah penyajian data berupa hasil analisis dan penerapan konsep dalam penelitian, peneliti akan mengambil kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan bahwa data-data yang peneliti gunakan mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: Klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai bagaimana klaim Tiongkok terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan. Dimulai dengan keberadaan wilayah LTS yang menjadi wilayah sengketa hingga tumpang tindih klaim wilayah oleh negara-negara di sekitar wilayah tersebut dengan sebagian besar wilayah di klaim oleh Tiongkok. Berangkat dari klaim Tiongkok yang dianggap mengancam keamanan stabilitas kawasan dan ikut mengancam kepentingan negara-negara di dunia, AS sebagai negara *great power* kemudian ikut terlibat dalam sengketa LTS.

### **BAB III: Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Wilayah Laut Tiongkok Selatan**

Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai awal keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan beserta definisi dari kepentingan-kepentingan nasional Amerika Serikat pada wilayah sengketa tersebut. Keterlibatan AS akan dijelaskan melalui kebijakan luar negeri AS terhadap kawasan Asia khususnya Asia Tenggara dan ASEAN sebagai institusi kawasan. Adapun kepentingan AS pun akan diuraikan melalui konsep kepentingan nasional dari Morgenthau dan persepsi ancaman terhadap klaim yang dilakukan oleh Tiongkok serta kebijakan-kebijakan AS terkait dengan wilayah LTS.

#### **BAB IV: Strategi Amerika Serikat dalam Mencapai Kepentingan Nasionalnya di Laut Tiongkok Selatan**

Dalam bab ini terdapat analisis mengenai bagaimana strategi Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan nasionalnya di Laut Tiongkok Selatan. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan konsep *adverse threat transition strategy* dari Thomas J. Wright seperti yang telah diuraikan pada bab I.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dari penelitian dan hasil penelitian yang telah ditemukan terkait dengan “Strategi Amerika Serikat dalam mencapai Kepentingan Nasionalnya di Wilayah Laut Tiongkok Selatan” serta saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya.